

SKRIPSI

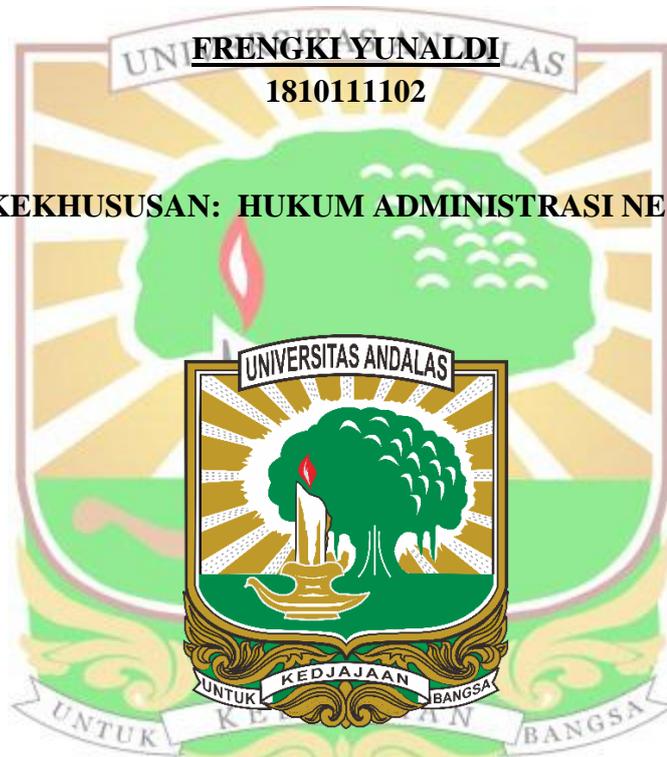
PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI NAGARI SUNGAI LIKU KABUPATEN PESISIR SELATAN

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FRENGKI YUNALDI
1810111102

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PKVII)



Pembimbing :

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg: 01/PK-VII/I/2025

ABSTRAK

Pembangunan desa di Indonesia merupakan salah satu prioritas nasional. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan mandiri. Dari UU Desa tersebut diterbitkanlah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa, dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya sistem pendampingan desa maka masyarakat desa bersama pemerintah desa diharapkan mampu memiliki kemampuan, keterampilan dan sikap yang memadai dalam menjalankan pembangunan desa, demi kesejahteraan masyarakat desa yang sesuai dengan implementasi UU Desa. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, pelaksanaan tugas pendamping lokal desa (PLD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku. Kedua, faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas PLD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara. Jenis data yang dianalisis dengan cara kualitatif dan data disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas pendamping desa di Nagari Sungai Liku, Dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dilihat dari beberapa program yang dilakukan PLD seperti fasilitasi dalam musyawarah pembangunan nagari, membentuk dan aktivasi lembaga-lembaga masyarakat, serta mengawal dan mengawasi setiap program pembangunan pemerintah nagari, yang masih sangat minim keikutsertaan pendamping dan masyarakat, hal ini disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan seorang PLD di bidang pendampingan, serta PLD juga tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma yang mengatur. Kedua, faktor-faktor yang menghambat tugas PLD dalam menyelenggarakan pemerintahan di Nagari Sungai Liku, pertama keterbatasan jumlah tenaga pendamping hanya berjumlah satu orang, sementara jangkauan wilayah kerja pendampingan di Kecamatan Ranah Pesisir sangat luas. Oleh karena itu, 1 pendamping tidak efektif mendampingi 10 nagari untuk menjalankan program yang telah ditugaskan oleh undang-undang. PLD juga mengalami kendala di masyarakat sehingga sulit berkolaborasi untuk mewujudkan desa mandiri sesuai dengan tujuan dari UU Desa, misalnya ketika PLD melakukan sosialisasi pada masyarakat masih ada saja yang tidak hadir. Menurut PLD dan BPD, hal ini terjadi karena masyarakat belum menyadari pentingnya bertanggung jawab terhadap pembangunan nagari.

Kata kunci: (Pendamping Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat)